

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Suara Baru

Wilayah: Kabupaten Kudus

# Sejumlah OPD di Kudus Peroleh Limpahan DBHCHT Cukup Besar, Ini Daftarnya

<https://suarabaru.id/2021/09/21/beberapa-opd-di-kudus-peroleh-limpahan-dbhcht-cukup-besar-ini-daftarnya/>

**KUDUS (SUARABARU.ID)** – Pemerintah Kabupaten Kudus menggeser puluhan miliar penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai upaya penyesuaian Peraturan Menkeu Nomor 206/2020. Tercatat sejumlah OPD mendapatkan limpahan anggaran yang cukup besar dari dana tersebut.

Kepala BPKAD Kudus, Eko Djumartono mengatakan penggeseran penggunaan anggaran tersebut dilakukan lantaran banyak kegiatan DBHCHT yang direncanakan di APBD murni 2021, tidak sesuai dengan PMK 206/2020.

"PMK 206/2020 terbit setelah APBD disahkan. Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan regulasi tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penggeseran beberapa kegiatan yang nantinya akan ditetapkan melalui APBD Perubahan,"kata Eko, Selasa (21/9).

Beberapa OPD yang mendapat tambahan anggaran DBHCHT cukup signifikan diantaranya RSUD dr Loekmonohadi yang semula mendapat alokasi Rp 29 miliar, akan bertambah menjadi Rp 57,7 miliar. Tambahan anggaran tersebut rencananya digunakan untuk pembelian alat kesehatan.

Tambahan anggaran cukup besar lainnya berada pada Disperinkop UMKM yang mana anggaran semula Rp 7 miliar berubah menjadi Rp 35 miliar dengan kegiatan utamanya berupa pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

Sedangkan di Diskominfo, juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 6 miliar dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan.

Tambahan signifikan lainnya juga muncul di Dinas Pertanian. OPD ini mendapat limpahan DBHCHT sejumlah Rp 2,3 miliar untuk kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa.

Sementara, OPD yang akhirnya anggaran DBHCHT nya terpaksa tidak bisa dilaksanakan digunakan diantaranya Dinas PUPR dengan anggaran Rp 38 miliar, Dinas PKPLH dengan anggaran Rp 6 miliar serta BPPKAD dengan anggaran Rp 11 miliar.

Untuk Dinas PUPR, kegiatan yang dibatalkan adalah kegiatan pembangunan fisik, dan Dinas PKPLH adalah kegiatan pengelolaan sampah. Sedangkan di BPKAD, anggaran yang tak bisa digunakan adalah untuk bantuan keuangan dan dana darurat.

"Perubahan anggaran tersebut diantaranya sudah dijalankan melalui mekanisme Perubahan Penjabaran APBD. Namun, perubahan tersebut tetap akan masuk dalam APBD Perubahan 2021,"kata Eko.

Disinggung soal rencana program pemberian BLT bagi buruh rokok, kata Eko, rencananya akan diambilkan dari pos anggaran DBHCHT yang dipastikan tak terserap. BLT buruh rokok yang rencananya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 45 miliar tersebut, akan diambilkan dari anggaran proyek gedung IBS RSUD serta beberapa pos lain yang gagal lelang.

PERUBAHAN ALOKASI DBHCHT KAB KUDUS 2021			
NO	SKPD	ANGGARAN APBD	RENCANA PERUBAHAN
1	DINKES	Rp 60.189.242.333	Rp 53.854.242.333
2	RSUD	Rp 29.999.997.047	Rp 57.795.122.167
3	PUPR	Rp 38.041.035.000	-
4	PKPLH	Rp 6.104.999.882	-
5	SATPOL PP	Rp 150.000.000	-
6	DINSOS	Rp 1.000.000.000	-
7	DISNAKERPERINKOP UMKM	Rp 7.999.934.000	Rp 35.058.121.500
8	DISKOMINFO	Rp 50.000.000	Rp 6.050.000.000
9	DISBUDPAR	Rp 150.000.000	-
10	BAG HUKUM	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
11	BPPKAD	Rp 11.647.277.738	-
12	BAG PEREKONOMIAN	-	Rp 275.000.000
13	DINAS PERTANIAN	-	Rp 2.300.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 155.532.486.000</b>	<b>Rp 155.532.486.000</b>

Sumber: BPPKAD Kab Kudus

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH